

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang terus berlanjut dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilakukan setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk membuat masyarakat makmur dengan merata. Pembangunan dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan di negara ini dalam memperoleh kualitas hidup warga yang lebih sejahtera. Oleh karena itu, perlu usaha dalam memulai pembangunan yang berkelanjutan. Kewajiban negara kepada masyarakatnya adalah untuk memenuhi kepentingan dengan melakukan pembangunan fasilitas-fasilitas publik.

Dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, pemerintah daerah menyediakan anggaran dana pada setiap desa dengan tujuan untuk meratakan pembangunan yang ada di Indonesia. Pemberian anggaran oleh pemerintah daerah untuk membangun kesejahteraan masyarakat merupakan tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup penduduk desa tersebut. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai program dan proyek yang bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta menyediakan bantuan kepada perkumpulan masyarakat yang membutuhkan. Dana desa tersebut dapat digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, dan saluran air, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk, atau untuk penyediaan layanan kesehatan dasar seperti puskesmas dan program vaksinasi. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk peningkatan kualitas

pendidikan serta untuk program bantuan sosial seperti bantuan bagi keluarga miskin (Kamila, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, selain dari pemerintah, desa mempunyai berbagai sumber pendapatan. Pendapatan ini meliputi hasil dari pajak dan retribusi, pendapatan hasil dari usaha desa tersebut, pendapatan dari pemerintah daerah kepada setiap desa, dan pendapatan dari APBN yang diberikan pada setiap desa, serta hibah/sumbangan pihak ketiga yang tidak terikat. Penggunaan dana desa ini diatur dalam pemerintahan desa Nomor 5 (2015) terkait penggunaan dana desa yang prioritas. Dana desa diarahkan untuk membangun kemampuan dan sumber daya masyarakat, yang paling utama ialah dalam mengurangi kemiskinan dan berusaha untuk melakukan peningkatan pada akses masyarakat. Ini selaras dengan tujuan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa dan rencana kerja pemerintah (RKP) desa, yang terdiri dari melakukan peningkatan kualitas dalam pemograman desa, dukungan terhadap usaha masyarakat, melakukan peningkatan kapasitas kader desa, melakukan pengorganisasian dan memfasilitasi masyarakat dengan paralegal sebagai bentuk bantuan hukum pada warganya, melakukan sosialisasi terkait kesehatan kepada masyarakatnya, mendukung masyarakat dalam mengelola hutan desa dan huta kemasyarakatan, dan yang terakhir ialah melakukan peningkatan kapasitas perkumpulan masyarakat (Kamila, 2020).

Partisipasi dari setiap elemen desa sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan desa. Partisipasi masyarakat, sebagai pemegang kedaulatan negara, ialah kunci keberhasilan program pembangunan dan

melakukan pengembangan kualitas masyarakat desa. Analisis partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan, kondisi partisipasi, serta faktor yang menyediakan pengaruhnya diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program. Partisipasi ini mencakup keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, identifikasi masalah, dan potensi masyarakat. Dengan tidak ikut sertanya masyarakat dalam melakukan pembangunan, kemungkinan besar pembangunan tersebut tidak akan berhasil. Keikutsertaan masyarakat ini memiliki tujuan untuk menunjang kemampuan individu yang ikut ataupun tidak ikut dalam pembangunan baik berupa ikut serta dalam mengambil keputusan ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat desa (Kamila, 2020).

Selain partisipasi masyarakat, kualitas pelayanan publik juga menyediakan pengaruh pembangunan desa. Pelayanan publik mencakup pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak warga negara, seperti kesehatan, pendidikan, administrasi, infrastruktur dasar, pengelolaan sampah, ekonomi, pencegahan bencana, dan bantuan sosial. Contoh pelayanan publik di desa termasuk layanan kesehatan di puskesmas, pendidikan di sekolah, administrasi di kantor desa, serta pembangunan infrastruktur seperti jalan dan listrik. Tujuannya ialah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup mereka (Sondank, 2020).

Percut Sei Tuan ialah salah satu dari 22 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Kecamatan ini memiliki tingkat kemiskinan tertinggi kedua di kabupaten tersebut, sebagian karena berbatasan langsung dengan Kota Medan dan memiliki karakteristik masyarakat perkotaan. Mayoritas penduduk Percut Sei Tuan ialah petani. Untuk memajukan sektor pertanian agar lebih efisien dan mampu

meningkatkan mutu produk, memperluas lapangan kerja, serta mengakses pasar domestik dan internasional, beberapa upaya perlu dilakukan. Upaya tersebut antara lain meliputi penerapan teknologi tepat guna, transformasi perilaku petani dari metode subsisten menjadi petani modern, serta memastikan efisiensi usaha tani yang berorientasi pada pasar. Sektor pertanian merupakan sektor penting dengan potensi besar dalam menunjang pembangunan desa-desa di kecamatan ini. Potensi tersebut dapat dioptimalkan dengan dukungan pihak terkait, terutama pemerintah melalui kebijakan yang mendukung sektor pertanian. Selama ini, sektor pertanian di Percut Sei Tuan masih diandalkan karena mampu berkontribusi dalam pemulihan ekonomi, terutama di masa krisis.

Dengan keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat, desa-desa di Kecamatan Percut Sei Tuan berharap dana desa dapat dikelola dengan baik untuk mendukung perekonomian masyarakat. Pengelolaan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dan memperkuat sektor pertanian sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Kecamatan Percut Sei Tuan mengalami ketergantungan ekonomi yang signifikan pada dana desa untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program pembangunan lainnya. Oleh karena itu, keberlanjutan pengelolaan dana desa sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kecamatan tersebut. Kecamatan Percut Sei Tuan juga memiliki tingkat kemiskinan yang perlu ditangani dengan menggunakan dana desa. Dengan memastikan keberlanjutan pengelolaan dana desa, kecamatan ini dapat terus berupaya mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan

infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Jadi, kalau dana desa yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan dapat menyediakan manfaat langsung bagi kualitas hidup masyarakat di kecamatan Percut Sei Tuan. Ini termasuk akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peluang ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.

Pengelolaan dana desa merupakan aspek penting dalam pembangunan pedesaan di Indonesia, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi melalui partisipasi masyarakat, tata kelola yang baik, dan akuntabilitas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwasanya meskipun alokasi dana desa terus meningkat, efektivitas pengelolaannya masih menghadapi berbagai kendala. Lemahnya pengawasan dan kurangnya kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama yang menghambat transparansi serta akuntabilitas keuangan desa. Misalnya, Simanjuntak et al. (2023) menemukan bahwasanya meskipun manajemen keuangan, partisipasi masyarakat, dan implementasi tata kelola yang baik memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan desa, pengawasan dan kualitas sumber daya manusia tidak selalu signifikan. Selain itu, Sofia dan Fitriyah (2022) juga menekankan pentingnya partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa, namun mencatat bahwasanya kasus korupsi tetap tinggi karena rendahnya kontrol masyarakat. Penelitian lainnya oleh Suhardi et al. (2022) menegaskan bahwasanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa, yang penting untuk menstimulasi keterlibatan masyarakat. Fachrun et al. (2020) menunjukkan

bahwasanya partisipasi masyarakat terjadi pada berbagai tahap pengelolaan dana desa, meskipun ketidaksiapan beberapa desa dalam menerima dana masih menjadi hambatan utama. Akhirnya, Saragih dan Alpi (2023) menemukan bahwasanya tata kelola yang baik memainkan peran signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa, meskipun partisipasi masyarakat sendiri tidak selalu berdampak signifikan. Dari berbagai penelitian ini, jelas bahwasanya meskipun ada banyak faktor yang menyediakan pengaruh pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat dan tata kelola yang baik tetap menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Pengaruh Partisipasi Aktif Masyarakat Dan Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Pengelolaan dana desa Pada Desa Se-Kecamatan Percut Sei Tuan”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa: Pengelolaan dana desa sering kali tidak efektif, meskipun alokasinya meningkat setiap tahun. Faktor-faktor seperti manajemen keuangan, partisipasi masyarakat, dan tata kelola yang baik memengaruhi akuntabilitas keuangan desa.
2. Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi program pembangunan masih rendah, yang menghambat efektivitas pembangunan.

3. Kualitas Pelayanan Publik: Pelayanan publik yang kurang memadai dalam hal kesehatan, pendidikan, administrasi, dan infrastruktur dasar turut menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat.
4. Ketidaksiapan Desa dalam Menerima Dana: Beberapa desa belum siap dalam menerima dan mengelola dana desa dengan baik, yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan program-program pembangunan.

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa pembatasan yang perlu diperhatikan agar hasil yang diperoleh dapat terfokus dan relevan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Pembatasan tersebut meliputi:

1. Keterbatasan Geografis: Penelitian ini dibatasi pada desa-desa di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
2. Fokus Pada Dana Desa: Studi ini akan fokus pada pengelolaan dana desa dan tidak mencakup sumber pendapatan desa lainnya secara mendalam.
3. Aspek Partisipasi Masyarakat: Penelitian akan menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, termasuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.
4. Kualitas Pelayanan Publik: Analisis akan difokuskan pada bagaimana kualitas pelayanan publik memengaruhi pengelolaan dana desa.
5. Variabel Terkait: Penelitian akan membatasi variabel-variabel terkait pada partisipasi masyarakat, kualitas pelayanan publik, dan pengelolaan dana desa, tidak mencakup variabel lain yang mungkin juga berpengaruh.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pengaruh partisipasi aktif masyarakat terhadap pengelolaan dana desa yang ada di kecamatan Percut Sei Tuan?
2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap pengelolaan dana desa yang ada di kecamatan Percut Sei Tuan?
3. Apakah partisipasi aktif masyarakat dan kualitas pelayanan publik berpengaruh secara simultan (Bersama-Sama) terhadap pengelolaan dana desa yang ada di kecamatan Percut Sei Tuan?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi aktif masyarakat terhadap pengelolaan dana desa yang ada di kecamatan Percut Sei Tuan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap pengelolaan dana desa yang ada di kecamatan Percut Sei Tuan.
3. Untuk mengetahui partisipasi aktif masyarakat dan kualitas pelayanan public berpengaruh secara simultan (Bersamaan) terhadap pengelolaan dana desa yang ada di kecamatan Percut Sei Tuan.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menyediakan pengetahuan yang lebih dalam tentang bagaimana partisipasi aktif masyarakat dan kualitas pelayanan publik berkontribusi terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini dapat memperkaya literatur tentang administrasi publik, kebijakan pembangunan, dan manajemen sumber daya.
- b. Penelitian ini dapat membantu mengembangkan dan menguji kerangka konseptual yang dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan dana desa, yang dapat dipakai sebagai dasar untuk penelitian masa depan dan pengembangan kebijakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menyediakan wawasan yang berharga kepada para pembuat kebijakan, praktisi pembangunan, dan pemangku kepentingan terkait tentang faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan dana desa di Kecamatan Percut Sei Tuan. Hal ini dapat membantu mereka dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan program intervensi yang sesuai.
- b. Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah setempat dan lembaga terkait untuk meningkatkan praktik pengelolaan dana desa, seperti merancang strategi partisipatif yang lebih efektif dan meningkatkan kualitas layanan publik yang disediakan kepada masyarakat.
- c. Dengan menyoroti peran partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dana desa, penelitian ini juga dapat menyediakan dorongan bagi masyarakat setempat untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan di wilayah mereka sendiri.